



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

RENCANA PENGADAAN ASN TAHUN 2023

Asisten Deputi Perancangan Jabatan,
Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur

bangga
melayani
bangsa



POKOK-POKOK SUBSTANSI

1

KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023

2

KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023

3

KETENTUAN PENGUSULAN INSTANSI PUSAT

4

KETENTUAN PENGUSULAN INSTANSI DAERAH

5

DOKUMEN USULAN



KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023

1.024.492 KEBUTUHAN ASN

Berdasarkan Surat Menteri PANRB kepada Menteri Keuangan RI
Nomor: B/382/M.SM.01.00/2023
perihal Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2023

KEBUTUHAN PEMERINTAH PUSAT

81.119 kebutuhan ASN, yang terdiri dari:

- a. 34.453 CPNS
- b. 46.666 PPPK

KEBUTUHAN DARI LULUSAN SEKOLAH KEDINASAN

6.259 kebutuhan CPNS, dari lulusan sekolah
kedinasan tahun 2023



KEBUTUHAN PEMERINTAH DAERAH

943.373 kebutuhan PPPK, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Guru sejumlah 580.202,
- b. Jabatan Tenaga Kesehatan sejumlah 327.542,
- c. JF Tenaga Teknis lainnya sejumlah 35.629.

KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2023

“ memperhatikan

ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan **PRINSIP ZERO GROWTH**, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di **bidang pendidikan** dan **bidang kesehatan**.



KETENTUAN PENGUSULAN INSTANSI PUSAT

- Pemerintah Pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPPK

Pengusulan CPNS

Hanya untuk bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen dan tenaga dosen

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022

Kebutuhan tenaga dosen merujuk pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek

Pengusulan PPPK

berpedoman pada Peraturan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional

Mengacu pada KemenPANRB tentang jenis jabatan yang dapat diisi PPPK

syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari Instansi Pembina

Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data Renbut dari Kementerian Kesehatan



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KETENTUAN PENGUSULAN INSTANSI DAERAH

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki BUP tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan/kemampuan anggaran

Pengusulan PPPK

diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar **pendidikan** dan **kesehatan** pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar

Mengacu pada KemenPANRB tentang jenis jabatan yang dapat diisi PPPK

syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari Instansi Pembina

Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data Dapodik Kemendikbudristek

Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data Renbut dari Kementerian Kesehatan



Peta Jabatan



Tautan Peta Jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses/diunduh;

Surat Usulan



Surat usulan kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK

Rincian Usulan



Cetak rincian usulan dari aplikasi e-Formasi yang telah ditandatangani oleh PPK

SPTJM



Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK

disubmit melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Terima Kasih



DISCLAIMER:

This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.



kempanrb



kemenpanrb



Kementerian-PANRB

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

menpan.go.id

Renbut Kemenkes untuk
Kementerian/Lembaga

Login - Renbut.Kemkes.go.id

- Kl_[kode instansi menpan]
- Contoh kl_9999



The screenshot shows the login interface for the Renbut application. At the top left is the logo of the Indonesian Ministry of Health (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), which consists of a stylized cross shape in teal and yellow. To the right of the logo, the text "KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below the logo and text, the application title "Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDM (RENBut) Versi 4" is shown in a smaller font. The login form includes several input fields: a "Login" label above the "Username" field, a "Password" field, an "Akun:" label above a dropdown menu currently showing "Renbut", and a "Kode Keamanan" label above a text field containing the number "834685". A prominent blue "Log In" button is located at the bottom of the form. Below the button, there is a red link labeled "Petunjuk Penggunaan Aplikasi Renbut v4".

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDM (RENBut) Versi 4

Login

Username

Password

Akun:
Renbut

834685

Kode Keamanan

Log In

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Renbut v4

Halaman Daftar Isi - Kosong

- Tambahkan faskes ke dalam daftar Kementerian/Lembaga anda dengan tombol Tambah Faskes

RENBUT

KEMENTERIAN UJICoba(Kementerian Lain) ▾

Beban Kerja >

Desk Kebutuhan Kementerian Ujicoba

Status Berita Acara : **Terbuka**

Daftar Faskes di aplikasi Renbut masih KOSONG, silahkan tambahkan Faskes anda dengan tombol dibawah

Tambah Faskes

Halaman Tambah Faskes

- Daftar Faskes yang bisa dipilih berasal dari data faskes yang sudah terdaftar di SISDMK

Desk Kebutuhan Kementerian Ujicoba

[Kembali](#)

Search: klinik

No	Propinsi	Kab/Kota	Jenis Faskes	Kode Faskes	Nama Faskes	Aksi
1	JAWA TENGAH	BLORA	Klinik	H3316002	KLINIK PT KAI MEDISKA CEPU	Tambah Faskes
7	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	Klinik	K3372010034	Klinik Mediska KAI Solo Baiapan	Tambah Faskes
59	JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	Klinik	K3173018754	Klinik Pratama Jiwasraya	Tambah Faskes
62	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K3603050033	Klinik Alpha Medika Binong	Tambah Faskes
63	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K3603050034	Klinik Evi Medika Binong	Tambah Faskes
64	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K3673020	Klinik Bina Karya Medika	Tambah Faskes
65	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K360308120107	Klinik dr. Ranny Cisauk	Tambah Faskes
66	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K36030504	Klinik IMI Curug	Tambah Faskes
67	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K36030505	Klinik Karunia Husada Curug	Tambah Faskes
68	BANTEN	TANGERANG	Klinik	K36030506	Klinik Dr. Surono Curug	Tambah Faskes

Halaman Daftar Isi

Desk Kebutuhan Kementerian Ujicoba

Status Usulan Formasi: **Terbuka**

Finalisasi Desk Kebutuhan dan usulan Formasi PPPK

Daftar Faskes dari Kementerian Ujicoba

Tambah Faskes

Cetak Berita Acara Desk Kebutuhan Cetak Rekap Usulan Formasi PPPK

Search:

No	Propinsi	Kab/Kota	Jenis Faskes	Kode Faskes	Nama Faskes	Aksi	Usulan Formasi PPPK							Nilai	
							Te	il	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya		Ahli Utama
1	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	Laboratorium Kesehatan	M33720001	Laboratorium Kimia Fama Adi Sucipto	Data DESK Hapus	6	7							
2	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	Klinik	K3372010034	Klinik Mediska KAI Solo Balapan	Data DESK	0	0	0	1	0	0	0	0	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Halaman desk kebutuhan faskes

- Pada halaman ini jabatan di tambahkan dan di isi dengan nilai perhitungan abk, eksisting dan usulan formasi PPPK

Form Desk Kebutuhan Kementerian Ujicoba

[Kembali](#) 1

[Tambah Jabatan](#) 2

Kode Faskes : K3372010034 3
Nama Faskes : Klinik Mediska KAI Solo Balapan
Jenis Faskes : Klinik
Kepemilikan : BUMN

Search: 4

No	Jabatan	Aksi	Usulan Formasi PPPK							Eksisting ASN					
			Ter	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya
1	Dokter	Ubah Nilai 5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Halaman Tambah Jabatan di Faskes

- Pilih Jabatan yang akan dimasukkan data perhitungan abk, eksisting dan usulan formasi PPPK

Form Tambah Hasil Desk

Kode Faskes	:	Klinik Mediska KAI Solo Balapan
Nama Faskes	:	K3372010034
Jabatan	:	----Pilih Nama Jabatan----

Pilih Terlebih Dahulu Jabatan yang akan dimasukkan data

[Kembali](#) [Simpan](#)

Halaman Tambah Jabatan di Faskes

- Usulan formasi hanya bisa di isi pada jenjang yang disarankan

Jenjang	Perhitungan ABK	Eksisting	Desk Kebutuhan	Usulan Formasi PPK	MHPK
Terampil	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Jenjang pada Jabatan ini tidak disarankan untuk diajukan sebagai usulan formasi PPPK 2023	
Mahir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Jenjang pada Jabatan ini tidak disarankan untuk diajukan sebagai usulan formasi PPPK 2023	
Penyelia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Jenjang pada Jabatan ini tidak disarankan untuk diajukan sebagai usulan formasi PPPK 2023	
Ahli Pertama	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5 THN"/>

Terimakasih

SOSIALISASI MEKANISME PENGUSULAN FORMASI DALAM PENGADAAN PPPK JF KESEHATAN INSTANSI PUSAT TAHUN 2023

30 Maret 2023

DIREKTUR PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dasar Hukum Pelaksanaan Rekrutmen PPPK JF Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

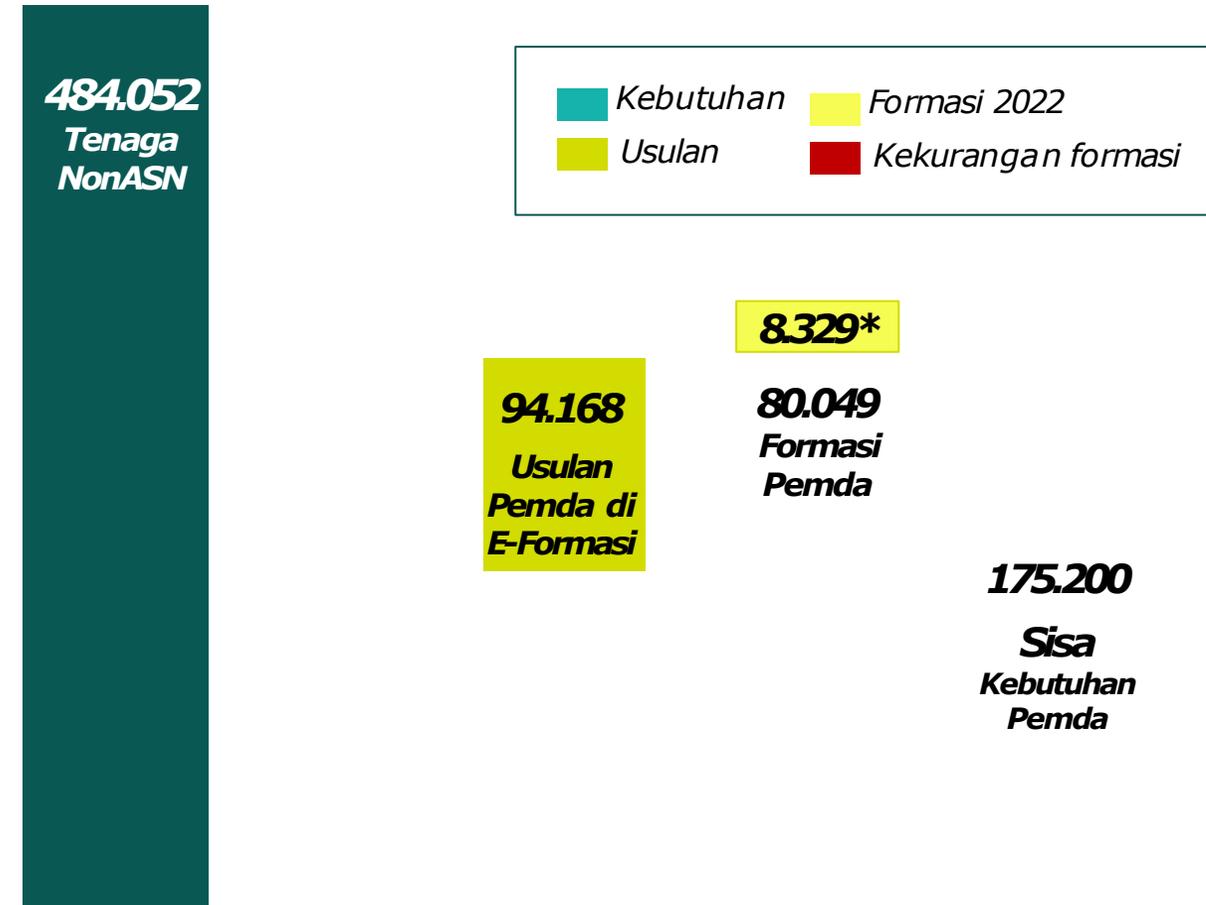


Permenpan RB 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 HANYA ~52% dari Nakes Non ASN yang Saat Ini Bekerja/Terdata

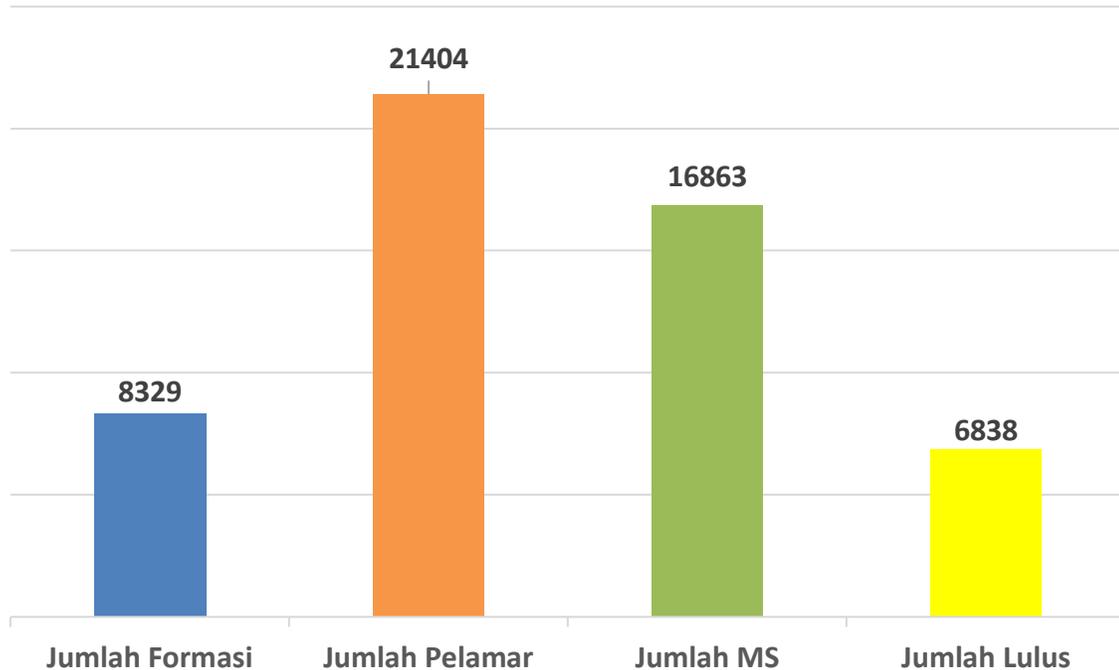
Penetapan Formasi Nakes Tahun 2022



1. Saat ini terdata **484.052 orang** tenaga kesehatan Non ASN Pemda, sementara kebutuhan tenaga kesehatan di Pemda hanya sebesar **255.248** (52% dari total nakes)
2. Usulan kebutuhan Pemda (sesuai kapasitas fiskal) melalui E-Formasi awalnya **94.168**
3. Formasi akhir yang ditetapkan Kemenpan RB berdasarkan usulan Pemda sebanyak **80.049** dan K/L sebanyak **8.329**
4. Masih terdapat **175.200** kebutuhan tenaga kesehatan Pemda yang **belum terakomodir dalam Formasi PPPK 2022**

*) Formasi K/L exclude

Pemenuhan Tenaga Kesehatan Pusat melalui PPPK Tahun 2022 sebanyak **6.838 Lulus Formasi**



1. Formasi tenaga kesehatan yang ditetapkan Kemenpan RB khusus Kementerian/Lembaga sebanyak **8.329** formasi
2. Pelamar yang melamar pada formasi K/L sebanyak **21.404** orang
3. Jumlah pelamar yang memenuhi syarat dan dapat mengikuti seleksi kompetensi sebanyak **16.863** pelamar
4. Jumlah akhir tenaga kesehatan yang lulus pada formasi K/L sebanyak **6.838** formasi

Proses Pengadaan PPPK bagi Tenaga Kesehatan 2023



Pemerintah Daerah

Penyusunan rencana kebutuhan, Pengusulan formasi dan penyiapan anggaran

Rekrutmen, seleksi, dan pembayaran gaji ASN



Kementerian Kesehatan

Pemetaan, penetapan rencana kebutuhan dan kriteria afirmasi



Kemenpan-RB BKN

Pertimbangan teknis, penetapan formasi, dan juknis seleksi



Kemendagri-Kemenkeu

- Pengaturan anggaran belanja pegawai
- Mengelola Dana Transfer Umum



SURAT MENPAN RB NOMOR 521 TAHUN 2023

14 Maret 2023



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/521/M.SM.01.00/2023
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023

14 Maret 2023

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di Tempat

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah tahun anggaran 2023 maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri PANRB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selanjutnya usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip *zero growth*, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing Jabatan Fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut:

1. Instansi Pusat

Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki Batas Usia Pensiun tahun 2023 serta kesediaan/kemampuan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instansi Pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPPK;
- b. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen;

- a. Tautan Peta Jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses/diunduh;
 - b. Surat usulan kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK;
 - c. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-Formasi yang telah ditandatangani oleh PPK; dan
 - d. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK.
5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023.
6. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga).

Dalam hal Instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan Instansi Saudara **tidak melaksanakan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2023**.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Abdurrahman Azwar Anas

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala BKN;
5. Kepala BPKP.

**POIN UTAMA
DALAM SURAT
MENPAN
NOMOR 521**

- ✓ Pengusulan Kebutuhan Formasi PPPK Tenaga Kesehatan **MERUJUK pada Data Kebutuhan dari Kementerian Kesehatan**
- ✓ Periode Pengisian Usulan Formasi PPPK JF Kesehatan **tanggal 20 Maret – 30 April 2023**
- ✓ Instansi yang tidak mengusulkan formasi sampai dengan tanggal yang ditentukan, dianggap **tidak melaksanakan Pengadaan ASN TA 2023**

SURAT DIRJEN NAKES NOMOR 626 TAHUN 2023 25 Maret 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508
Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PN.02.02/F/626/2023 25 Maret 2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal seluruh Kementerian dan Lembaga
 2. Sekretaris Daerah Provinsi se Indonesia
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia
- Di Tempat

Sehubungan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah, dimana dalam poin 1 huruf d dinyatakan bahwa dalam pengusulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Berkenaan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan, telah menyediakan Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan (Aplikasi Renbut) <https://renbut.kemkes.go.id> sebagai alat untuk menghitung dan mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes);
2. Data kebutuhan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) diatas adalah data referensi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai rencana kebutuhan tenaga kesehatan per jenis dan jenjang jabatan fungsional yang telah dihitung oleh masing-masing Instansi (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Renbut dan divalidasi bersama dengan Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Bagi Instansi yang sudah menyampaikan usulan kebutuhan tenaga kesehatannya melalui Aplikasi Renbut dan tidak ada perubahan usulan, dapat menindaklanjuti dengan pengusulan formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 pada Aplikasi Renbut (Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Renbut untuk Pengusulan Formasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023 terlampir);

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Retno Ayunisari, SKM (089617006290); Sdri. Bety, SKM, M.Si (Han) (089523092295); atau Sdri. Ester Veronica Putri (089677183128).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

**POIN UTAMA
SURAT
DIRJEN
NAKES

(TINDAK
LANJUT OLEH
KEMENTERIAN
/LEMBAGA)**

- ✓ Pengusulan kebutuhan formasi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023 **MERUJUK** kepada data kebutuhan tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan yaitu **DATA REFERENSI KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN YANG TELAH DIVALIDASI BERSAMA OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN DAN MASING-MASING KEMENTERIAN/LEMBAGA**
- ✓ Pengusulan formasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 **MELALUI APLIKASI RENBUT KEMENKES YANG SUDAH DIHUBUNGKAN KE APLIKASI E-FORMASI KEMENTERIAN PAN RB ; PALING LAMBAT 7 APRIL 2023**

TERIMA KASIH

